

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan di Indonesia adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Agenda otonomi daerah yang dilakukan pemerintah di Indonesia diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan integrasi sosial di masyarakat. Selain itu, otonomi daerah dianggap sebagai opsi tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset dan politik serta sumber daya lokal. ★

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah mengarahkan fokus pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang mana di era Pemerintah saat ini dikeluarkan dalam Nawacita khususnya Nawacita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” yang diejawantahkan secara operasional melalui catur sakti yang bermakna desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi.

Menurut Adisasmita, Kumala & Simanungkalit, 2013 Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya sekitar 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk

memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan.

Sejak tahun 1970an para pakar banyak yang memanfaatkan metode, pendekatan, dan logika berpikir survei verifikatif dalam meriset masalah sosial masyarakat pedesaan. Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.395. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan) dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat desa. Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan), struktur perekonomiannya sangat besar pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis 2 agraris.

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia.

Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan desa itu.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun dalam Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2016, status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat desa.

Penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis 5 desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain. Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama).

Salah satu poin yang paling penting dalam pembahasan Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2016 adalah terkait indeks desa membangun. Namun dalam penerapannya ada saja hal yang menjadi hambatan desa dalam menuju desa mandiri seperti sumber daya alam, letak geografis, dsb. Selain itu tingkat kesiapan tata kelola yang masih rendah dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di desa, juga dapat menghambat tujuan desa menjadi desa mandiri.

Salah satu kendala yang mendominasi adalah tempat yang sulit di jangkau sehingga proses pembangunan terhambat. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kesenjangan pembangunan. Berbagai program percepatan yang diharapkan menjadi katalis terhadap peningkatan kegiatan pembangunan nyatanya masih dirasa kurang dampaknya.

Berikut data Update 2021 PDDI Kemendes.

Tabel 1. 1 Pusat Data Desa Indonesia Kemendes Kategori Desa Maju 2021 di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Bintan.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nilai IDM
1	Bintan Utara	Lancang Kuning	0.7711
2	Gunung Kijang	Teluk Bakau	0.7852
3	Gunung Kijang	Malang Rapat	0.8013
4	Teluk Bintan	Bintan Buyu	0.7276
5	Teluk Sebong	Pengudang	0.7106
6	Gunung Kijang	Gunung Kijang	0.7183
7	Teluk Sebong	Berakit	0.7187
8	Mantang	Mantang Besar	0.7616
9	Teluk Sebong	Sebong Lagoy	0.7135
10	Teluk Sebong	Ekang Anculai	0.7114
12	Toapaya	Toapaya Selatan	0.7229

Sumber: Data PDDI Kemendes Kategori Desa Maju, 2021.

Kesiapan yang dimaksud dalam konteks ini adalah strategi pemerintah desa dalam mengelola desa dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan pemerintah desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tidak akan tercapai. Dalam konteks nyata, kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, perencanaan desa, pengadaan sarana dan prasarana desa, dan pengelolaan kelembagaan desa sesuai dengan peraturan pelaksanaan undang-undang desa yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu adanya strategi-strategi dari desa agar terwujudnya desa yang mandiri.

Pada umumnya aspek sumberdaya manusia di pedesaan mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta pengelolaan potensi yang belum berkembang. Saat ini Desa Malang Rapat dalam bidang sarana dan prasarana sangat baik dan sudah lengkap dibuktikan dengan, adanya tiga gedung Sekolah Dasar, satu gedung Sekolah Menengah Pertama, Gedung Taman Pendidikan Al-Quran dan juga Gedung PAUD. Sarana kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, Polindes, dan Posyandu. Dan juga sarana Peribadatan, yaitu Masjid, Surau, dan Gereja. (SIPBM Tahun 2022)

Desa Malang Rapat juga memiliki Kelompok Usaha Bersama yang berfungsi untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang bergabung di anggota Kelompok Usaha Bersama. Hasil dari Kelompok Usaha Bersama ini bermacam-

macam ada kerupuk ikan, menghasilkan palawija, kue-kue khas Malang Rapat, serta anyaman khas yang terbuat dari lidi. (SIPBM Tahun 2022)

Desa Malang Rapat sangat memiliki potensi yang begitu luar biasa seperti alat tangkap kelong yang begitu banyak di Malang Rapat, budi daya ikan lele, dan juga Desa Malang Rapat memiliki potensi luar biasa dalam bidang wisata karena Desa Malang Rapat memiliki potensi alam pantai yang mempesona, saat ini potensi tersebut belum bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. (SIPBM Tahun 2022)

Dengan potensi wisata alam pantai yang luar biasa, Desa Malang Rapat bisa memanfaatkan ini untuk menjadi keunggulan utama desanya dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, karena saat ini Desa Malang Rapat belum bisa memanfaatkan potensi wisata alam yang dimiliki sehingga potensi tersebut dikelola oleh pihak swasta dan memberikan efek kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Malang Rapat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa Malang Rapat Mewujudkan Desa Mandiri Melalui Aspek Ketahanan Ekonomi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Malang Rapat mewujudkan Desa Mandiri Melalui aspek Ketahanan Ekonomi.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan maka tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Malang Rapat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya desa maju.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini berkenaan dengan perkembangan teori-teori yang ada dan bisa dijadikan acuan penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah untuk pemahaman tentang strategi pemerintah desa dalam upaya menuju desa mandiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah literature kajian Ilmu Administrasi Publik mengenai strategi pemerintah desa dalam menuju desa mandiri serta dapat digunakan sebagai referensi bagi yang melakukan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini berkaitan dengan terjawabnya tujuan dari penelitian, adapun manfaaat secara praktis berikut ini:

1. Bagi peneliti dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang belum sempurna, serta dapat menjadi pengalaman dengan terjun langsung ketengah-tengah masyarakat.
2. Bagi Universitas Maritim Raja Ali Haji khususnya program studi Ilmu Administrasi Publik diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dimasa yang akan datang.
3. Bagi peneliti lain hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literature untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai penyempurnaan untuk penelitian yang terbatas ini.

